

ARTIKEL

STUDI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT III DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAHAdrianus Satrio Herbowo, Tri Yuniningsih, M. Mustam
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana. Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In the apparatus of state development efforts can not be separated from the role of education and training. Education and training are well supported by the provision of education and training well too. A good curriculum, good teachers, good infrastructure, and good regulations will support the implementation of the optimal education and training

The research is descriptive qualitative, so it uses the phenomenon in which there are interview subjects. This phenomenon is about leadership training that consist of referenced curriculum, facilities and infrastructure, lecturer, participant education and training. Where this phenomenon is a decisive indicator and constraining factors of education.

Based on the interview can be seen that providing education and leadership training level III which has become routine was still save some fundamental issues that should have the attention of the organizers of the Education and Training Institute of Central Java Province.

Keywords: Leadership Training and Education

Pendahuluan

A. Latar belakang

Pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu agenda nasional dalam pendayagunaan aparatur pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang profesional diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan tuntutan profesionalisme aparatur, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang Pendidikan dan Pelatihan dituntut dapat menyiapkan aparatur pemerintah yang profesional di Jawa Tengah, melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional, maupun kepemimpinan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah terakreditasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui SEKDA. Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan di Jawa Tengah.

Akreditasi Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 308/IX/6/4/2003 Tanggal 23 April 2003, menyatakan bahwa Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Tengah memenuhi kualifikasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan.

Dari berbagai program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012, program pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan adalah program Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat III. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III adalah jenis program pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural dalam hal ini adalah pejabat struktural eselon III. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat di bawahnya. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober s.d. 29 November 2012, bertempat di Kampus Sasana Widya Praja Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Setiabudi No. 201 A Semarang.

Keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh berbagai macam faktor antara lain penentuan tujuan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kurikulum, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, penetapan peserta dan widyaiswara, penyelenggaraan administrasi dan keuangan, proses pembelajaran dan lingkungan fisik serta lingkungan emosional. Faktor-faktor tersebut akan menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggara Pendidikan dan pelatihan, apabila berada dalam kerangka system. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa faktor yang menentukan keberhasilan Pendidikan dan pelatihan adalah system penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan yang integral, dimana sub system dari system tersebut terkait satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, ada beberapa unsur yang menjadi penilaian akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yaitu tenaga kediklatan, program diklat, dan fasilitas diklat. Ketiga unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut : Tenaga Kediklatan, Program Pendidikan dan Pelatihan, Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil pra survey ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi fenomena penelitian yaitu : kurikulum yang bersifat baku dan tidak fleksibel, sarana dan prasarana yang kurang ditingkatkan, widyaiswara yang jumlahnya tidak memadai serta jumlahnya yang tidak memadai, dan regulasi penetapan peserta yang tidak tegas.

Berangkat dari gambaran di atas, maka peningkatan kompetensi aparatur seyogyanya tidak dilihat secara parsial tetapi holistik. Keseluruhan unsur ini perlu *dimanage* melalui pembuatan sistemnya, penerapan sistem tersebut secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna menghasilkan SDM aparatur yang profesional. Sejalan dengan gambaran kondisi Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Tengah di atas, maka dalam penelitian ini saya mengambil judul ”Studi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah”.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Badan

Pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Tengah; mendiskripsikan dan menganalisis pencapaian program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang meliputi kurikulum, widyaiswara, sarana dan prasarana, dan peserta Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III; identifikasi faktor penghambat dan pendorong pencapaian program

C. Teori

Teori yang digunakan adalah teori pendidikan dan pelatihan serta proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pengertian latihan dan pengembangan berbeda. Latihan (*training*) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik penguasaan ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin (diambil dari buku T. Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*.2000:104). Latihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang.

Dari pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pengembangan pegawai di lingkungan organisasi pemerintah dilaksanakan melalui banyak cara, salah satunya jalur pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai upaya menciptakan aparatur pemerintah yang berkualitas, profesional dan memiliki keahlian, ketrampilan serta semangat pengabdian yang tinggi dan pengembangan karier yang jelas.

Dengan kata lain, pendidikan dan pelatihan bagi PNS merupakan solusi yang harus dilaksanakan dan dikembangkan.

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/ 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV pada Bab VI Penyelenggaraan huruf B dinyatakan bahwa Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan selama 5-6 minggu, 285 jam pelatihan @ 45 menit, dan peserta diasramakan. Adapun proses penyelenggaraan diklatpim Tingkat IV telah dibakukan standar prosesnya melalui 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap Persiapan dengan kegiatan-kegiatan:

Analisis kebutuhan Diklat; Seleksi calon peserta; Pengajuan rencana penyelenggaraan ke LAN; Penetapan Peserta; Persetujuan penyelenggaraan dari LAN; Pemanggilan Peserta; Rapat Koordinasi Penyelenggaraan; Penyiapan akomodasi, pedoman dan bahan diklat; Penetapan Jadwal dan Widyaiswara; Rekonfirmasi Widyaiswara;

D. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada serta menggunakan deskripsi kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan berlokus di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *snowball sampling* dimana menggunakan satu *key person* yaitu Kasubid Diklat Kepemimpinan Menengah dan Pemerintah Daerah.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, *interview guide*, kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa gambaran yang sifatnya mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, serta data sekunder yaitu dokumen yang diperlukan dalam untuk penilaian lapangan.

Pengumpulan data menggunakan pengamatan mendalam, dokumentasi, dan wawancara mendalam.

Sedangkan pengolahan data atau informasi dilakukan melalui analisis taksonomi yang meliputi beberapa tahapan dimulai dari *review* catatan lapangan, pengelompokan atau kategorisasi, reduksi data, *display* data, pengkategorian data yang terkumpul, dan menarik kesimpulan / verifikasi.

Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Kurikulum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan yang terdapat pada kurikulum dalam pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dimana kurikulum yang ada saat ini merupakan kurikulum yang sifatnya baku dan tidak bersifat fleksibel dimana tidak bisa dikembangkan sesuai dengan dinamika birokrasi yang ada. Kurikulum yang ada saat ini sudah ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Metode yang diterapkan pada kurikulum tersebut dianggap kurang aplikatif dan terkesan membosankan. Hal ini nampak pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bangdalmudik.

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

Sarana dan prasarana yang ada memang sudah sesuai dan memenuhi standar penilaian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan, namun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan dilengkapi seperti CCTV yang bertujuan untuk menunjang kegiatan *monitoring* proses belajar mengajar di ruang kelas yang belum terpasang di seluruh kelas. Penanganan teknis yang dianggap belum sigap karena masih banyak keluhan dari peserta terhadap kerusakan fasilitas yang skalanya kecil. Pemeliharaan yang tidak dapat dilakukan dengan optimal dikarenakan biaya pemeliharaan yang terbatas dimana biaya pemeliharaan tidak sebanding dengan anggaran yang ada setiap tahunnya.

Widyaiswara

Widyaiswara merupakan unsur yang penting dalam menunjang keberhasilan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Widyaiswara yang ada saat ini di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah 25 orang, dimana jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Masih banyak widyaiswara yang perlu meningkatkan dan memperbaiki teknik mengajarnya. Masih diperlukan ToT untuk widyaiswara agar dapat mengajar dengan baik.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Yang seringkali menjadi permasalahan dari fenomena ini adalah regulasi penetapan peserta. Dimana dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, ditetapkan bahwa pegawai negeri sipil yang diperbolehkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III adalah pegawai yang sudah atau akan menduduki struktur eselon III. Ini menjadi tidak tegas karena kaitannya dengan motivasi peserta sendiri.

No.	Fenomena	Temuan Pokok
1	Kurikulum	tidak fleksibel
		metode pembelajaran kurang aplikatif dan kurang variatif
2	sarana dan prasarana	penggunaan CCTV yang belum optimal dan belum tersedia di seluruh kelas
		biaya pemeliharaan yang masih minim
		kurang sigap dalam penanganan teknis di lapangan
3	widyaiswara	beberapa widyaiswara belum mengikuti ToT
		widyaiswara kurang aplikatif dalam penyampaian materi
		jumlah widyaiswara yang kurang memadai
4	Peserta pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Regulasi penetapan peserta yang tidak tegas

B. Analisis

Kurikulum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan

beberapa permasalahan terkait kurikulum. Kurikulum yang digunakan sudah seharusnya bersifat fleksibel sesuai dengan dinamika yang ada karena kaitannya dengan langkah pemerintah dalam menciptakan aparatur pemerintah yang dapat menghadapi dinamika birokrasi yang selalu berubah secara dinamis.

Dalam kurikulum tersebut juga masih memiliki beberapa kelemahan seperti metode pembelajaran yang diterapkan kurang variatif dan terkesan membosankan bagi peserta. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, metode pembelajaran yang diterapkan hanya berupa ceramah, pendalaman materi, studi kasus, diskusi, simulasi, dan penulisan kertas kerja. Seharusnya untuk mencapai pendalaman materi yang efektif diterapkan metode pembelajaran praktek lapangan setidaknya 10% dari keseluruhan komposisi metode pembelajaran. Sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan

Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan diadakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang ada yang digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan program pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2 tahun 2008 tentang pedoman akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah disebutkan bahwa penilaian lembaga pendidikan dan pelatihan juga terdapat pada ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan serta dapat menunjang keberhasilan program pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan sebagian besar sarana dan prasarana sudah tersedia, namun dalam kaitannya dengan penerapan teknologi modern seperti CCTV belum seluruh kelas terpasang CCTV dan pemanfaatannya kurang optimal. Hal ini terbukti dengan tidak tercapainya fungsi pengawasan melalui CCTV karena tidak adanya seorang petugas yang ditempatkan secara khusus untuk memantau proses belajar mengajar melalui CCTV.

Kaitannya dengan pemeliharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah terbatas pada anggaran pemeliharaan dimana anggaran pemeliharaan yang ada tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan yang semakin meningkat. Penanganan teknis yang dilakukan setelah adanya laporan dari konsumen dalam hal ini peserta pendidikan dan pelatihan dianggap masih kurang sigap. Hal ini terbukti pula dalam hasil evaluasi yang dilakukan Bangdalmudik terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III Angkatan XLVI.

Widyaiswara

Widyaiswara yang baik adalah widyaiswara yang sudah memenuhi syarat widyaiswara seperti yang tercantum pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, dimana syarat menjadi widyaiswara adalah sebagai berikut :

Serendah-rendahnya Widyaiswara Madya; Berpendidikan minimal S1 atau setara; Berpengalaman dalam birokrasi sesuai dengan tingkat jabatan peserta pendidikan dan pelatihan dan materi yang diajarkan; Pernah mengikuti *sitting program* pada program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang

diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi; Pernah mengikuti TOT yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang menjadi mintanya ; Dalam hal tidak tersedia pejabat fungsional widyaiswara, maka penyelenggara dapat memberdayakan widyaiswara luar biasa dengan persyaratan minimal yang sama dengan kualifikasi Pejabat Fungsional Widyaiswara

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat beberapa permasalahan yaitu beberapa widyaiswara yang tidak mengikuti ToT (*Training for Trainers*), hal ini menyebabkan widyaiswara yang ada kurang berkompeten dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang diampu. Di sisi lain jumlah widyaiswara yang tidak memadai yaitu 25 orang, dimana jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.

Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Yang seringkali menjadi permasalahan adalah peraturan penetapan peserta yang terdapat pada poin kedua dimana di poin tersebut disebutkan bahwa peserta yang diperbolehkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mencapai struktur eselon III atau akan dipersiapkan menduduki struktur eselon III. Hal ini juga erat kaitannya dengan usia peserta, usia peserta yang dianggap masih produktif sesuai dengan masa aktif pegawai negeri sipil yaitu kurang dari 50 tahun karena apabila usia peserta di atas 50 tahun akan lebih sulit dalam menerima materi pendidikan dan pelatihan.

Penutup

Berdasarkan penelitian mengenai "Studi Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dinilai masih kurang bagus. Hal ini terbukti dengan ditemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan tersebut dirangkum menjadi fenomena penelitian yaitu :

Kurikulum

Berdasarkan kurikulum yang ada saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak fleksibelnya kurikulum yang ada saat ini dan metode pembelajaran yang masih kurang efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut menyebabkan penerapan kurikulum tidak sesuai dengan dinamika yang ada di birokrasi dan penerapannya tidak optimal.

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

Meskipun sarana dan prasarana sudah tersedia, namun dalam kondisi realitanya di lapangan masih saja ada kendala teknis yang dikeluhkan oleh peserta. Anggaran pemeliharaan yang terbatas membuat pemeliharaan tidak berjalan lancar. Penanganan teknis dianggap tidak sigap setelah adanya laporan dari peserta.

Widyaiswara

Widyaiswara yang ada saat ini sebagian besar sudah memenuhi syarat dan beberapa widyaiswara belum mengikuti ToT sesuai bidang yang diampu. Jumlah widyaiswara yang terbatas yaitu sebanyak 25 orang tidak sebanding dengan jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan, hal ini menyebabkan widyaiswara terpaksa mengampu bidang diklat yang bukan bidang keahliannya sehingga penyampaian materi tidak maksimal.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Regulasi penetapan peserta menjadi permasalahan yang kurang diperhatikan. Regulasi penetapan peserta yang tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, disebutkan bahwa peserta yang diperbolehkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III adalah pegawai negeri sipil yang sudah atau akan menduduki struktur eselon III, hal ini erat kaitannya dengan motivasi peserta.

Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan di atas dirumuskan saran yang diberikan peneliti kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Kurikulum

Sebaiknya dilakukan segera revisi kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III karena banyak permasalahan yang ada pada kurikulum saat ini yaitu kurikulum yang sifatnya baku dan metode pembelajaran yang tidak efektif. Revisi kurikulum sebaiknya dilakukan melalui koordinasi antara pihak Bangdalmudik dan pihak Diklatpim agar revisi dapat berjalan maksimal.

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

Sarana dan prasarana yang ada sebaiknya lebih ditingkatkan agar dapat menunjang program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Perlu ditingkatkan kesiapan dalam penanganan teknis setelah adanya laporan dari peserta. Perlu diadakan evaluasi anggaran karena anggaran pemeliharaan yang ada saat ini dianggap tidak sesuai dengan tingginya

biaya pemeliharaan sarana dan prasarana.

Widyaiswara

Sebaiknya widyaiswara yang ada saat ini diikutkan ToT widyaiswara yang baik sehingga penerapan metode penyampaian materi yang dilakukan lebih variatif dan lebih efektif dan efisien.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Sudah seharusnya regulasi penetapan peserta lebih ditegaskan dengan cara revisi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III. Hal ini karena sangat berpengaruh pada motivasi peserta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Daftar Pustaka

- Handoko, T.Hani.2000.*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*,edisi ke-2.Yogyakarta:BPFE.
- Rosidah, Ambar Teguh Sulistyani.2009.*Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*.Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Sofyandi, Herman. 2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan PNS
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 540/XIII/10/6/2001
- Renstra Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013
- Keputusan Kepala LAN No. 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III